



DIY Jaga 35 Ribu Hektare Lahan Pertanian

■ Upaya Pemerintah Bertahan di Tengah Ancaman Krisis Pangan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY berkead untuk menjaga kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan. Salah satunya adalah dengan mempertahankan lahan pangan berkelanjutan.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan wilayah DI Yogyakarta mampu mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri. Sejumlah kebijakan pun diterbitkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di wilayah ini.

"Untuk menjaga suplai bahan pangan, kami juga menjaga luasan lahan pertanian. Kami punya program mempertahankan minimal 35.000 hektare lahan pangan selain padi di DIY," ujar Sultan

usai menerima kunjungan kerja Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/8).

Namun regulasi ini juga memiliki konsekuensi. Misalnya, jika terjadi puso atau gagal panen di mana

Pemerintah DIY harus menanggung kerugian petani. Selain itu juga ada masalah alih fungsi lahan produktif di beberapa kabupaten di DIY yang berpotensi mempengaruhi produksi pangan.

"Jika ada jual beli lahan, bupati punya tanggung jawab untuk mencari lahan pengganti seluas lahan yang diperjualbelikan," papar Sri Sultan.

Sri Sultan merinc, total luas lahan pertanian di DIY mencapai sekitar 52.104 hektare dengan jumlah produksi padi DIY pada tahun 2021 mencapai 853.564 ton. Adapun jumlah yang dikonsumsi hanya sekitar 680.000-an ton.

Artinya, DIY mengalami surplus pangan sekitar 173.000 ton yang kemudian bisa menjadi stok pangan atau disimpan dalam wujud gabah. Selain itu, untuk meningkatkan ketersediaan pangan, Penda DIY mewajibkan seluruh ASN untuk membeli produk beras lokal hasil petani warga DIY.

"Berbagai kebijakan yang

KOMITMEN BERSAMA

- Penda DIY berkead jaga lahan pangan berkelanjutan di tengah ancaman krisis pangan.
- Penda DIY punya program mempertahankan minimal 35.000 hektare lahan pangan selain padi.
- Total luas lahan pertanian di DIY mencapai sekitar 52.104 hektare.
- Produksi padi DIY pada tahun 2021 mencapai 853.564 ton.

kami keluarkan ini bertujuan agar harga tidak fluktuatif dan tetap bisa menghasilkan pangan yang cukup untuk masyarakat DIY sendiri. Selanjutnya, selain harga komoditas, tantangan yang kami hadapi ialah pengembangan pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan stok bahan pangan," jelas Sri Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Wantannas RI, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro mengatakan, kedaulatan pangan memang menjadi tujuan utama dari ketahanan pangan yang terus diupayakan pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi mer-

deka, berdaulat, adil dan makmur, tidak hanya terkait kedaulatan wilayah, tapi juga kedaulatan ekonomi dan pangan. "Saya bertugas membantu memformulasikan rancangan kebijakan untuk Presiden yang berkaitan dengan mengantisipasi segala bentuk ancaman, tantangan dan hambatan terhadap stabilitas keamanan nasional," paparnya.

Sistem resi gudang

Harjo mengungkapkan, kunjungan kerja Wantannas kali ini ke DIY berkaitan dengan masalah sistem resi gudang. Sistem resi gudang sendiri dinilai menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dengan mekanisme tunda jual.

"Yoga sudah relatif lebih baik dan basis sistem resi gudang ini menjadi penting untuk menunjang ketahanan pangan, bahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan 153 sistem resi gudang di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, sistem ini dapat menunjang program pemerintah dalam rangka menghadapi krisis pangan," jelasnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005